



Puluhan PKL TM2 kembali menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka di depan TM2, Rabu (17/7).

► **PENATAAN MALIOBORO**

PKL TM2 Ngotot Dilibatkan dalam Relokasi

DANUREJAN—Sejumlah pedagang Teras Malioboro 2 (TM2) kembali menggelar aksi, Rabu (17/7), sama seperti tuntutan sebelumnya, dalam aksi yang digelar di depan TM2, mereka meminta dilibatkan dalam perencanaan relokasi yang rencananya digelar 2025.

Dalam aksinya, para pedagang membentangkan spanduk sepanjang lima meter bertuliskan *Petisi Rakyat Untuk Kesejahteraan PKL*, dengan ratusan tanda tangan pedagang. Sejumlah poster bernada protes juga dibawa para pedagang.

Ketua Koperasi Tri Dharma, Arif Usman, menyatakan mereka menginginkan relokasi yang partisipatif, transparan dan menjajhterakan. "Tuntutan kami tetap sama [dilibatkan dalam rencana relokasi], tetapi sampai sekarang tidak ada kemajuan [respons] sama sekali," katanya.

Ia mengaku para pedagang tidak dilibatkan dalam proses relokasi. Pemerintah hanya melibatkan orang-orang tertentu yang tidak merepresentasikan kepentingan para pedagang. "Selama ini tidak ada partisipasi dari para pedagang," katanya.

Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriyati, menuturkan dengan adanya keluhan dari para PKL, semestinya pemerintah membuka ruang dialog. Dia juga menyayangkan terjadinya bentrokan yang melibatkan pedagang dan petugas keamanan pada Sabtu (13/7).

Dia juga menanggapi pernyataan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, yang menyatakan adanya kontrak *person to*

person dengan para pedagang untuk relokasi. Menurutnya, selama relokasi dari selasar ke Teras Malioboro 2 hingga saat ini, tidak ada surat perjanjian apapun yang pernah ditandatangani para pedagang.

"Pedagang belum pernah menandatangani kontrak apapun. Yang pernah dilakukan pemerintah khususnya UPT Cagar Budaya yaitu validasi data. Hanya pencocokan," katanya.

Staf Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Raka Ramadhan, menyampaikan PKL TM 2 memiliki hak untuk dilibatkan dalam perencanaan pembentukan dan pelaksanaan partisipasi publik.

Untuk itu, hal pertama yang harus dilakukan oleh Pemda DIY dan Pemkot Jogja adalah menunda proses relokasi. "Setelah menunda, Pemda DIY maupun Pemkot Jogja menggelar evaluasi, kemudian memperbaiki," ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Jogja, Sugeng Purwanto, mengatakan penataan pedagang TM 2 dilakukan untuk memberikan aspek legalitas. "Kalau dulu hanya UMKM, tapi begitu masuk di teras mereka menjadi *tenant*," ujar Sugeng saat ditemui usai mengisi acara di Hotel Burza, Senin (15/7).

Sugeng mengatakan pro dan kontra akan muncul dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, dia memastikan tak ada kebijakan pemerintah yang akan merugikan masyarakat. Penataan TM2 bukan untuk menurunkan pendapatan pedagang, tetapi justru menjadikannya semakin tertata dan mendatangkan lebih banyak pengunjung. (Lupas Suberkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005